

**BAB IV**

**KONTRIBUSI KH. TB. AHMAD CHATIB**

**DALAM PEREDARAN UANG KERTAS**

**ORIDABS**

**A. Terjadinya Peristiwa “Revolusi Sosial”**

Pada masa kerajaan Islam di nusantara, Banten merupakan suatu kesultanan Islam yang sangat besar dan strategis yang memiliki pelabuhan strategis yang merupakan jalur perdagangan internasional. Oleh sebab wilayah ini menjadi rebutan negara-negara Eropa kala itu. Pada akhirnya wilayah Banten jatuh ketangan penjajah Belanda yang berhasil dengan politik *divide et impera*.<sup>1</sup>

Banten merupakan salah satu wilayah keresidenan dari lima keresidenan di wilayah Jawa Barat yang meliputi, yang terdiri dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Kemudian dibentuklah pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah Keresidenan Banten yang ada dibawah naungan pemerintahan pusat Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ini

---

<sup>1</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p. 70

melibatkan para elit pemuda, elit politik dan para pemimpin masyarakat setempat.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beberapa hari kemudian, beberapa pemuda Jakarta datang ke Banten untuk menyampaikan berita kemerdekaan. Oleh pemuda setempat berita itu disebarluaskan ke wilayah keresidenan. Tindakan pemuda selanjutnya yaitu menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan. Sementara itu seperti pegawai pemerintah seperti pamong praja bersikap diam, bahkan gelisah, banyak diantara mereka meninggalkan Banten menuju Jakarta, Bogor atau Bandung. Residen Banten R.T Rangga Tirtasoeyatna yang diangkat oleh pemerintah RI 19 Agustus melarikan diri.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi jabatan yang kosong, melalui suatu rapat atas prakarsa pemuda yang dihadiri oleh utusan beberapa golongan, antara lain di putuskan mengangkat K.H Tb. Achmad Chatib sebagai Residen Banten tanggal 2 September 1945 yang diresmikan oleh

---

<sup>2</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p. 162-163

pemerintah pusat.<sup>3</sup> Residen Achmad Chatib mengangkat kembali para pejabat lama pada pemerintahan daerah. Sedangkan rakyat menginginkan pengangkatan pejabat-pejabat baru. Oleh karena itu di berbagai tempat melalui rapat umum memilih pejabat pemerintah daerah dilingkungan mereka masing-masing. Hampir semua pejabat pamong praja dari residen sampai camat, bahkan lurah terdiri dari kaum ulama. Untuk membantu kaum ulama menjalankan pemerintah maka pejabat lama tetap dipertahankan. Menurut pandangan rakyat pada umumnya bahwa para pejabat pamong praja lama, dari bupati sampai para lurah, pejabat kepolisian dan kejaksaan harus diganti dengan pejabat baru yang terdiri dari tokoh masyarakat. Menurut mereka para pejabat lama itu merupakan alat pemerintah kolonial yang bekerja untuk tuannya. Pandangan rakyat tersebut semakin kuat ketika para pamong praja dinilai ragu-ragu menempatkan diri mereka dalam arus revolusi yang sedang berkejolak di mana-mana untuk mempertahankan kemerdekaan. Memang pada saat Belanda melancarkan Agresi Militer I, wilayah Banten tidak mengalami

---

<sup>3</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*,....., p. 168.

adanya kontak fisik akan tetapi pengaruh tersebut tetap terasa dengan adanya blokade.<sup>4</sup>

Pendirian masyarakat yang sudah kuat tersebut diperkuat lagi dengan adanya provokasi dari golongan radikal, yang menyatakan para pejabat pemerintah terutama pamong praja merupakan “warisan kolonial”. Banyak orang yang datang menghadap residen untuk memprotes dan menggati agar pejabat lama tersebut segera diganti. Akan tetapi residen tetap pada pendiriannya. Menurutnya para pejabat dan pegawai lama memiliki keahlian di bidang administrasi yang sangat diperlukan agar pemerintah tetap berjalan.

Setelah tidak adanya titik temu di antara kedua belah pihak, maka masyarakat Banten secara sepihak menempuh caranya sendiri. Oleh sebab itu atas kekecewaan kebijakan residen maka kaum komunis yang didukung rakyat memusatkan perhatian pada pembentukan sebuah dewan yang disebut “Dewan Rakyat” di bawah pimpinan Tje Mamat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p.168-169

<sup>5</sup> Abdul Malik, *Jejak Ulama Banten Dari syekh Yusuf Sampai Abuya Dimiyati*, Cilegon : CV Larayba, 2004, p. 61

## 1. Aksi “Dewan Rakyat”

Telah di jelaskan sebelumnya, atas kekecewaan terhadap keresidenan maka masyarakat membentuk sebuah dewan yang merupakan kerjasama komunis, kaum agama (ulama) dan jawara dalam suatu wadah “Dewan Rakyat” dan di pimpin oleh Tje Mamat alias Mohamad Mansur, yang pada tahun 1926 menjadi sekretaris PKI cabang Anyer. Setelah kegagalan perlawanan komunis tahun 1926 ia melarikan diri ke Malaya, di sana diterima dalam partai republik indonesia (Pari) partai baru yang didirikan Tan Malaka. Pada tahun 1945 menjabat sebagai ketua KNID Kabupaten Serang, yang resmi sebagai pembantu residen dalam menjalankan pemerintahan, ternyata tidak sejalan bahkan mementangnya.<sup>6</sup>

Pembentukan “Dewan” yang di pimpin Tje Mamat dengan cepat mendapat dukungan dari kalangan petani dan jawara. “Dewan” dimasuki oleh orang-orang radikal dan revolusioner mengintimidasi dan menghasut rakyat untuk membalas dendam terhadap jepang, pamong praja, dan polisi. Di beberapa tempat terdapat semboyan-semboyan yang populis

---

<sup>6</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p.171-173

yaitu “ Darah Rakyat Masih Mengalir”, ”Rakyat Akan Menjadi Hakim”, “Satu Untuk Semua”, “Semua Untuk Satu”. “Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah” (Soendji 1983:20; Williams 1990: 72). Semboyan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran dan membuat gelisah masyarakat terutama pegawai pemerintahan. Untuk mendukung “Dewan” tersebut maka di bentuklah pasukan yang disebut Laskar Gulkut yang terdiri dari kaum jawara. Laskar ini dibentuk untuk membunuh para pamong praja.<sup>7</sup>.

“Dewan” mulai beraksi pada bulan oktober 1945, setelah serangan BKR bersama badan-badan perjuangan di keresidenan Banten terhadap markas kenpeitai di Serang. Selanjutnya sasaran kaum radikal tersebut adalah penjara, pamong praja dan polisi. Penyerangan terhadap penjara ini pada tanggal 27 Oktober 1945 karena di penjara tersebut terdapat banyak jawara-jawara yang ditahan yang mendukung terhadap “Dewan”. Sehari kemudian, pada saat malam hari para pendukung dewan membunuh enam orang eropa yang ditahan di penjara tersebut. Selain itu juga

---

<sup>7</sup> Nina H Lubis, Banten Dalam Pengumpulan Sejarah,  
....., p.172

terdapat pembunuhan terhadap para pamong praja di beberapa tempat.<sup>8</sup>

Puncak dari serangan tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sekitar pukul 10.00 pagi, yaitu Tje Mamat dan beberapa anggota pimpinan “Dewan”, yakni H. Mu’min, Soleman, H. Ahmad, dan H. Ma’mun menemui Residen Ahmad Chatib di kantor keresidenan. Di dalam kantor residen tersebut penuh dengan pengikut Tje Mamat dengan membawa senjata-senjata tajam. Pada kesempatan itu Tje Mamat sebagai ketua “Dewan” memaksa residen agar menyerahkan kekuasaan kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, untuk menghindari banyaknya korban tidak ada pilihan lain, maka residen menurutinya.<sup>9</sup>

Pada tanggal 28 Oktober 1945 di keluarkan maklumat yang di tanda tangani Tje Mamat yang diperkuat oleh Bupati Serang Hilman Djajadiningrat dan disetujui oleh Residen Ahmad Chatib. Isinya bahwa hari itu kekuasaan Residen Banten jatuh ketangan “Dewan”. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut

---

<sup>8</sup> Nina H Lubis, Banten Dalam Pengumpulan Sejarah, ..... p.173

<sup>9</sup> Abdul Malik, *Jejak Ulama Banten Dari syekh Yusuf Sampai Abuya Dimiyati*, Cilegon : CV Larayba, 2004, p. 62

Residen Ahmad Chatib Masih Tetap menjadi Residen Banten, namun hanya sebagai simbol. Sedangkan kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Tje Mamat. Dalam maklumat tersebut terdapat kalimat “utang beras, bayar beras” yang menimbulkan berbagai tafsiran yang menggelisahkan rakyat, sehingga mereka satu per satu meninggalkan daerah Banten menuju daerah yang dinilai aman.

Selain itu pada saat malam harinya beberapa orang dari Laskar Gulkut menyerbu dan menangkap Bupati Serang Hilman Djajadiningrat, Kemudian dimasukkan kedalam penjara. Selanjutnya aksi “Dewan” menyerbu Detasemen Kepolisian Serang untuk mendapat senjata, namun hanya mendapat beberapa pucuk karena telah diserahkan kepada TKR. Jawatan-jawatan vital pun tidak luput dari penyerbuan seperti Jawatan Pos, Jawatan Telepon, Jawatan Listrik, Setasiun Kereta Api, dan sebagainya.

Bukan hanya merebut jawatan-jawatan vital, “Dewan” juga sering menggeledah rumah-rumah priyayi. “Dewan” juga menguasai cadangan beras, gula, garam dan tepung tapioka dari jepang serata membagikannya dengan sistem sederhana sampai

habis sampai bulan desember 1945. “Dewan” berhasil mengelola tugas distribusi pangan rakyat lewat “Dewan Ekonomi Rakyat” yang mereka bentuk. Selain itu “Dewan” membentuk pasukan kepolisian sendiri, awalnya bernama “Polisi Keamanan Rakyat” tetapi diubah menjadi “Polisi Khusus”.<sup>10</sup>

Tindakan-tindakan “Dewan” yang tidak mendapat perlawanan sedikit pun itu menimbulkan rasa sombong. Dengan mengenakan senjata mereka berkeliaran, menakut-nakuti rumah penduduk, bahkan merampah harta mereka.

Aksi “Dewan” tersebut melebarkan sayapnya sampai ke beberapa daerah seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sama yang dilakukan di kabupaten Serang, aksi “Dewan” ini juga merebut beberapa kantor vital dan melucuti anggota polisi setempat dan menggantinya dengan jawara. Untuk di daerah Pandenglang dewan tidak berhasil di bentuk, namun jawaranya berhasil melucuti kepolisian. Setelah itu mereka mengancam untuk menyerbu dan melucuti TKR setempat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p.173

<sup>11</sup> Abdul Malik, *Jejak Ulama Banten Dari syekh Yusuf Sampai Abuya Dimiyati*, Cilegon : CV Larayba, 2004, p. 63

## **2. Usaha Meredakan Revolusi**

Menyikapi dan adanya desas-desus, bahawa Banten akan berdiri sendiri, maka pemerintah pusat, yaitu Soekarno dan wakil presiden Mohamad Hatta disertai rombongan, pada tanggal 9-10 desember 1945 mengunjungi daerah itu. Dihadapan rakyat yang mengunjungi “rapat raksasa” di alun-alun Serang yang diselenggarakan oleh rakyat pada tanggal 9 desember 1945. Para perwakilan rakyat seperti Pesindo, Masyumi, TKR, TKR Laut dan Pemuda Putri menegaskan kesanggupan mereka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdiri dibelakang pemerintah dan siap untuk melawan bangsa asing yang akan menguasai Indonesia. Wakil presiden dalam sambutannya mengaharapkan agar rakyat dari berbagai golongan memperkuat persatuan untuk menegakan republik Indonesia. Dengan panjang lebar diterangkan arti kedaulatan yang menjadi dasar kemerdekaan dan menginsyafkan akan kewajiban rakyat terhadap negara. Dikatakan bahwa hendaknya kedaulatan ditafsirkan secara harfiah. Di ingatkan agar rakyat mengikuti petunjuk pemerintah pusat dan tidak berbuat atas kehendak

sendiri. Hatta juga mengatakan bahwa “Dewan Rakyat” tidak berguna dan berseru agar dibubarkan.<sup>12</sup>

Presiden dalam kesempatan itu mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat cinta terhadap tanah air. Ali Amangku, yang ditugaskan menjaga keamanan kedua tokoh besar itu, harus mengerahkan seluruh anggota TKR untuk menjaga tempat-tempat yang akan dikunjungi presiden; karena ada kabar bahwa Dewan Rakyat akan menculik presiden dan wakilnya.

Setelah mengunjungi Serang tempat dibentuknya “Dewan”, presiden, wakil presiden dan rombongan selanjutnya mengunjungi Rangkasbitung tempat kedua dibentuknya “Dewan”. Sama seperti di Serang, tempat ini juga diadakan rapat umum di alun-alun dan mendapat perhatian besar dari rakyat. Di sini juga dikatakan bahwa “Dewan Rakyat” tidak penting, hendaknya agar dibubarkan.

Menggunakan kesempatan kunjungan presiden dan wakil presiden, Tje Mamat tampil dimuka umum untuk mendemonstrasikan militansi revolusionernya dengan menjawab bahwa “Dewan” adalah lembaga sejati yang mewakili rakyat,

---

<sup>12</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p.173

sedangkan KNIP adalah pemberian Jepang. Pada waktu presiden mengunjungi Rangkasbitung “dewan menculik dan membunuh mantan bupati lebak R.T Hardiwinangoen, pembunuhan itu dilakukan atas utusan-utusan “Dewan”. Kunjungan presiden dan wakil presiden serta terbunuhnya mantan bupati, memainkan peran penting dalam situasi di banten. Kunjungan itu dapat digunakan untuk mengukur dukungan rakyat setempat terhadap “Dewan” dan perlu petunjuk mengendalikan kegiatannya. Terbunuhnya mantan bupati lebak menyebabkan “Dewan” kehilangan banyak pendukung. Kaum ulama bertambah cemas dengan melihat kejadian itu. Sebelum kunjungan presiden, TKR merasa takut untuk mengambil tindakan terhadap “Dewan” karena khawatir akan adanya reaksi dari pihak ulama setempat dan kaum petani.<sup>13</sup>

Aksi “Dewan” terus berlanjut dengan mneyingkirkan orang-orang yang dinilai sebagai “warisan kolonial”. Pada tanggal 31 desember 1945 “dewan menangkap Letnan Kolonel Entol Ternaja, komandan resimen III divisi 1000/1 dan Oskar Koesoemaningrat, kepala kepolisian keresidenan Banten. Di

---

<sup>13</sup> Nina H Lubis, *Banten Dalam Pengumpulan Sejarah*, Jakarta : Pustaka LP3S Indonesia, 2003, p.173

Pandeglang terjadi pertempuran antara pendukung “Dewan” melawan TKR setempat, pertempuran itu terjadi karena pihak “Dewan” berusaha merebut senjata milik TKR. Penangkapan “Dewan” terhadap kedua tentara tersebut menjadi lonceng kematian baginya. Melihat penculikan-penculikan itu Residen Ahmad Chatib menginstruksikan kepada panglima divisi 1000/1, Kolonel K.H Sjam’un untuk menumpasnya. K.H Sjam’un memanggil Mayor Ali Mangku, Komandan Batalyon Pengintai, untuk menyusun siasat penumpasan.<sup>14</sup> Langkah pertama ialah membebaskan Bupati Serang Hilman Djajadiningrat dari penjara Serang, penjara itu tidak dijaga begitu ketat oleh Laskar Gulkut. Setelah dibebaskan bupati dibawa ke sukabumi tempat yang lebih aman. Langkah berikutnya menyerang markas “Dewan” di Ciomas. Pada tanggal 8 Januari 1946 pasukan TKR dari tiga kota Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung serentak menyerang markas “Dewan”. Pertempuran berlangsung lebih dari 24 jam dan baru berhenti sesudah adanya campur tangan dari Residen Ahmad Chatib. Akhirnya Letnan Kolonel Entol Ternaja dan Oskar Koesoemaningrat yang disekap di markas “Dewan”

---

<sup>14</sup> Abdul Malik, *Jejak Ulama Banten Dari syekh Yusuf Sampai Abuya Dimiyati*, Cilegon : CV Larayba, 2004, p. 63

berhasil dibebaskan. Para pemimpin “Dewan” berhasil ditangkap kecuali Tje Mamat yang berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak dan bergabung dengan pasukan “Dewan di sana. Untuk selanjutnya dilakukan pembersihan dan mereka yang menyerah diberi pengampunan.

Sementara itu TKR di Rangkasbitung melakukan ultimatum agar “Dewan” dibubarkan, namun gagal dan pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Kerena tidak terlatih dan lemah persenjataannya, maka dengan mudah dapat dikalahkan. Para pemimpinnya ditangkap dan dilucuti. Tje Mamat untuk kedua kalinya berhasil meloloskan diri ke daerah Bogor dan bergabung dengan laskar rakyat disana. Di Bogor akhirnya Tje Mamat berhasil ditangkap lalu dibawa ke Yogyakarta.<sup>15</sup>

## **B. KH. Ahmad Chatib dalam Penetapan Uang Kertas Darurat Banten Tahun 1947-1948**

Siapa yang tidak tahu Banten? Provinsi hasil pemekaran Jawa Barat ini dulunya merupakan kesultanan yang makmur, namun kekuatannya dihancurkan secara politis oleh Belanda dan menjadi

---

<sup>15</sup> Abdul Malik, *Jejak Ulama Banten Dari syekh Yusuf Sampai Abuya Dimiyati*, Cilegon : CV Larayba, 2004, p. 63

sebuah keresidenan yang merupakan bagian dari jajahan Belanda saat itu (sejarah lengkapnya bisa dibaca di berbagai referensi yang mengulas Banten).

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, beberapa tahun kemudian Belanda datang dengan sekutu untuk menjajah kembali Negeri Nusantara. Akibat agresi tersebut, Indonesia mengalami krisis sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi terputus.<sup>16</sup>

Kedatangan Belanda ke Nusantara yang semula untuk mencari sumber rempah-rempah, berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Sikap Belanda yang tidak hanya ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah tetapi juga ingin menguasai Nusantara, mendorong timbulnya perselisihan antara Belanda dengan pribumi yang memunculkan pertempuran di beberapa wilayah di Nusantara. Beratus-ratus tahun pejuang pribumi pantang menyerah berusaha mengusir Belanda dari Nusantara, termasuk Banten. Kolonialisme telah menyebabkan krisis di segala aspek kehidupan. Bahan pokok sebagai kebutuhan sehari-hari semakin sulit didapat sehingga menimbulkan krisis pangan, krisis keuangan, dan moneter. Untuk

---

<sup>16</sup> Yetti Herayati, *Koleksi Pilihan Museum Negeri Provinsi Jawa Barat "Sri Baduga"*, (Jawa Barat, Permuseuman: 1996), p. 21.

mengatasi masalah kebutuhan pokok, peran pedagang daerah yang menyelundupkan bahan kebutuhan sehari-hari sangat membantu penduduk setempat. Untuk mengatasi masalah keuangan dan moneter, Karesidenan Banten mengeluarkan uang sendiri, yang dikenal dengan ORIDAB (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten) yang dicetak di Serang. ORIDAB terbuat dari kertas berwarna merah . pada kedua sudut sisi atas berhias gambar buah manggis dan sudut bawah bulir-bulir padi yang dibentuk bulatan. Tepi kiri dan kanan dihias pilin ganda. Di tengah atas tertulis “Republik Indonesia” dengan latar pita, di bawahnya kalimat *Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten*. Di kiri kanan bagian tengah gambar bulir-bulir padi dibentuk lingkaran. Bagian kiri berisi gambar masjid agung Banten Lama dan kanan pintu gerbang keraton Kaibon. Diantara kedua lingkaran tertera tanda tangan Panitia Keuangan Republik Indonesia: Abu Bakar; Residen Banten: Tb. K.H. Achmad serta tanggal pencetakan uang, 15 Desember 1947. Di tengah bawah hiasan motif oval yang terbentuk oleh rangkaian bulir padi yang diletakkan vertikal. Di dalam bidang oval itu tertulis no. Seri 061043. Seluruh tepi bagian belakang dihias salur-salur daun. Di tengahnya tertulis undang-undang, pemalsuan uang, diapit oleh

angka 25 di kiri dan kanannya.<sup>17</sup> Oridabs adalah dari Oeang Republik Indonesia Daerah Banten. Sementara mata uang ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Banten termasuk Tangerang, Jasinga dan Lampung. Pada tahun 1947 sampai dengan 1948 peredaran uang daerah tersebut sebagai akibat terputusnya hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Republik Indonesia yang pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946. Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran, pemerintah pusat memerintahkan para Residen untuk mencetak dan membuat uang darurat yang berlaku di daerah tertentu. Salah satunya adalah ORIDABS, dicetak di Jalan Diponegoro 6 Serang.<sup>18</sup>



---

<sup>17</sup> Yetti Herayati, *Koleksi Pilihan Museum Negeri Provinsi Jawa Barat "Sri Baduga"*, (Jawa Barat, Permuseuman: 1996), p. 21.

<sup>18</sup> Yetti Herayati, *Koleksi Pilihan Museum Negeri Provinsi Jawa Barat "Sri Baduga"* ..., p. 21.

Mesin Pembuatan ORIDAB yang berada di Museum Banten Lama

### 1. Uang Oridab

Pada masa perjuangan tahun 1945/1946 Pemerintah Pusat RI di Yogyakarta putus hubungan dengan Pemerintah Daerah Keresidenan Banten. Untuk memenuhi kebutuhan dan alat pembayaran di daerah maka Pemerintah Pusat di Yogyakarta memerintahkan Residen Banten K.H. TB. Achmad Chatib untuk mencetak dan mengeluarkan Uang Kertas Darurat Banten (ORIDAB) khusus untuk wilayah Banten yang termasuk Tangerang, Jasinga dan Lampung Selatan.

Di wilayah Banten yang merupakan bekas kerajaan besar di Indonesia, kesulitan dari segi perekonomian sudah menjadi hal yang sering terjadi, akan tetapi perjalanan pemerintah selaku motor dari masyarakat selalu berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi terutama dari segi perekonomian. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah Residen Banten yang dipimpin oleh KH. TB. Achmad Chatib telah mengeluarkan uang darurat yang disebut ORIDAB guna melancarkan roda perekonomian daerah Banten pada tahun 1947-1949.

## ORIDABS 25 Rupiah dan 50 Rupiah



Mata uang selain sebagai alat tukar, mencerminkan identitas ekonomi dan mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat pemakainya. Terlepas dari latar belakang pembuatan mata uang, kondisi tersebut telah memunculkan kreativitas meskipun pada masa-masa yang sulit. Keterbatasan tampaknya bukan menjadi kendala untuk berekspresi. Kemampuan seniman ORIDAB dalam mengekspresikan lingkungan Banten pada masa itu dapat dilihat di semua tipe ORIDAB. Gambar padi, kapas, pohon pinang, buah nanas, dan rambutan memperlihatkan beberapa keanekaragaman flora di daerah Banten. Jenis fauna yang muncul pada ORIDAB adalah burung, keong, dan ular. Sebagaimana diketahui, Pulau Burung yang terletak di sebelah utara Banten Lama sudah termasyur sejak dulu. Pulau tersebut dihuni jutaan ekor burung sehingga pulau

tersebut dinamakan Pulau Burung. Adapun ular tanah di daerah Banten merupakan spesies ular yang jarang dijumpai di daerah lain. Sisi lain kehidupan masyarakat Banten terlihat pada gambar Masjid Agung Banten beserta menaranya. Secara implisit gambar tersebut menunjukkan bahwa Banten sejak dulu kental dengan kehidupan agamis dan budaya santrinya. ORIDAB dikeluarkan dalam nominal 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, 25 Rupiah, dan 50 Rupiah. Mata uang 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, dan 25 Rupiah dikeluarkan di Serang, 15 Desember 1947. Adapun mata uang 50 Rupiah dikeluarkan di Serang, 11 Agustus 1948.

ORIDAB 1 Rupiah dibuat dari bahan kertas, berwarna dasar coklat muda, berukuran 13 cm x 6,5 cm. Bingkai dan gambarnya didominasi warna merah muda, sedangkan angka dan huruf berwarna hitam. Pada sisi depan mata uang di bagian tengah atas terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA dan tulisan SATU RUPIAH di bagian tengah bawah. Di antara tulisan tersebut terdapat gambar padi dan kapas yang melingkari gambar senapan, cangkul, dan palu. Sedangkan sisi belakang mata uang ini di bagian tengah terdapat gambar dua pohon pinang yang mengagip peringatan hukuman bagi pemalsuan mata uang.

ORIDAB 5 Rupiah dibuat dari bahan kertas, berwarna dasar putih, berukuran 14 cm x 7,5 cm. Bingkai dan gambar pada mata uang ini didominasi warna hijau, sedangkan tulisan berwarna hitam. Sisi depan mata uang tipe ini terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA dan LIMA RUPIAH di bagian tengah atas. Tulisan UANG KERTAS DARURAT DAERAH BANTEN membingkai setengah lingkaran gambar pintu gerbang bentar, nomor seri, serta tulisan TANDA PEMBAJARAN JANG SAH. Sisi belakang mata uang didominasi gambar padi, burung, dan angka 5.<sup>19</sup>

ORIDAB 10 Rupiah berbahan kertas, berwarna dasar putih, berukuran 15,5 cm x 8 cm. Bingkai, gambar dan tulisan didominasi warna hijau. Sisi depan mata uang ini terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA dan UANG KERTAS DARURAT UNTUK DAERAH BANTEN. Di bagian tengah terdapat gambar kubah yang melingkupi Masjid Agung Banten beserta menara dan tiang. Di kanan – kiri kubah terdapat gambar keris, buah nanas, senjata semacam gada, dan buah rambutan. Pada sudut kiri dan kanan bagian atas terdapat gambar burung. Adapun sisi belakang terdapat angka 10 serta peringatan hukuman bagi pemalsuan mata uang.

---

<sup>19</sup> Hasil pengamatan penulis pada uang kertas ORIDAB

ORIDAB 25 Rupiah berbahan dasar kertas berwarna putih, berukuran 14 cm x 7,5 cm. Bingkai, gambar, dan tulisan berwarna merah. Sisi depan mata uang terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA dan UANG KERTAS DARURAT UNTUK DAERAH BANTEN TANDA PEMBAJARAN JANG SAH. Di bagian tengah terdapat angka 2 dan 5 yang mengapit gambar gada dan keris serta tulisan DUA PULUH LIMA RUPIAH. Gambar dan tulisan tersebut diapit oleh gambar pintu gerbang bentar dan Masjid Agung Banten lengkap dengan menara dan tiamah. Sisi belakang mata uang terdapat gambar keong dan burung, serta peringatan hukuman untuk pemalsuan uang.<sup>20</sup>

ORIDAB 50 Rupiah dibuat dari bahan kertas, berbahan dasar putih, berukuran 15 cm x 8,3 cm. Gambar dan tulisan didominasi warna merah dan hitam. Sisi depan mata uang terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA dan UANG KERTAS DARURAT UNTUK DAERAH BANTEN TANDA PEMBAJARAN JANG SAH. Di bagian tengah terdapat angka 50 dan tulisan LIMA PULUH RUPIAH. Angka dan tulisan tersebut diapit gambar pintu gerbang bentar dan Masjid Agung Banten lengkap dengan menara dan

---

<sup>20</sup> Hasil pengamatan penulis pada uang ORIDAB

tiamah. Di bagian bawah terdapat gambar unggas. Adapun sisi belakang mata uang terdapat gambar ular serta peringatan hukuman bagi pemalsuan mata uang.

Akibat dari krisis tersebut, Karesidenan Banten mencetak uang sendiri yang dinamakan ORIDAB (Oeang Repoblik Indonesia Daerah Banten) yang digagas oleh KH. Tubagus Ahmad Khatib yang saat itu menjadi Residen Banten yang tetap RI. Mungkin masyarakat sekarang akan berpikir untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia ketika memiliki kemampuan membuat mata uang sendiri dan memiliki ekonomi yang maju. Namun, masyarakat Banten saat itu memiliki jiwa nasionalisme segagah Gunung Krakatau, sehingga tidak terpikir untuk memisahkan diri dari RI.<sup>21</sup>

### **C. Fungsi Uang Oridab bagi Masyarakat Banten**

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Namun di tengah-tengah kemerdekaan itu tercoreng pada akhir September 1945 mendaratlah tentara sekutu yang diboncengi Belanda (NICA) di berbagai tempat yang

---

<sup>21</sup> Abdullah, *Peranan Uang ORIDAB Dalam Perekonomian Daerah Banten Tahun 1947-1949*, SKRIPSI, Serang : 2001, p.55

mempunya nilai politis, ekonomis, maupun militer sesuai dengan konsep strategi mereka, era revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pun di mulai.

Banten merupakan bagian wilayah Indonesia, yang terletak di bagian paling barat dari pulau Jawa terkenal karena di samping merupakan tempat yang pertama kali dikunjungi Belanda, juga di daerah ini sering terjadi pemberontakan. Pada abad ke-19 terjadi serangkaian pemberontakan yang berpuncak pada pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Kemudian pada tahun 1926 Banten menjadi panggung pemberontakan komunis yang cukup mencemaskan pemerintah kolonial. Pemberontakan yang mempunyai semangat kuat anti Belanda dan priyayi dapat ditumpaskan.

Ketika bangsa Indonesia memasuki jaman revolusi, hampir semua wilayah Indonesia mengalami yaitu melawan penjajah Belanda yang menginginkan kembali berkuasa di Republik Indonesia yang sudah merdeka ini, ketika tentara sekutu untuk pertama kali mendarat di Indonesia. Memasuki abad ke-20, saat Partai Komunis Indonesia menancarkan pengaruh dan ideologinya di Indonesia, lagi-lagi orang Banten melakukan pemberontakan, yaitu pada tahun 1926. Di bawah pimpinan Tje Mamat dan para ulama,

diantaranya Tb. Kyai Achmad Khatib melalui Partai Komunis Indonesia (PKI), melakukan perlawanan dan pemberontakan atas kebijakan pemerintah Kolonial, Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang besar, apabila Negara-negara sedang berkembang ingin dengan cepat mencapai pendapatan yang tinggi. Keaikan pendapatan yang tinggi itu kerap kali harus dimodali oleh dana yang berada diluar Negara yang sedang berkembang. Dengan demikian, Negara-negara seperti itu dengan suka rela atau terpaksa harus mengorbankan kebebasan ekonomi dan politiknya agar pendapatan mereka segera naik.<sup>22</sup>

Proses pertumbuhan ekonomi disuatu Negara sangat terjadi dengan konstelasi perkembangan politik yang berkembang di pusat pemerintahan kota. Kondisi bangsa Indonesia yang baru saja terbebas dari berbagai penjajahan, berimbas pula terhadap kondisi pertumbuhan perekonomian Banten, recovery terhadap perkembangan perekonomian Banten ini dengan membuat sebuah kebijaksanaan pemerintah pusat untuk membuat uang pada daerahnya masing-masing.

---

<sup>22</sup> Abdullah, *Peranan Mata Uang ORIDAB Dalam Perekonomian Daerah Banten Tahun 1947-1949*, SKRIPSI, (Serang : 2001), p. 63.

Karena blockade Belanda dan sulitnya komunikasi, banyak daerah yang mencetak mata uang sendiri. Tekanan dan meluasnya kekuasaan militer zBelanda pada agresinya yang kedua dan semakin hebatnya gempuran dan aksi militer Belanda., membuat pemusatan dan pengedaran uang tidak bisa dilakukan lagi. Komunikasi pusat dan daerah terputus. Guna memecahkan persoalan keuangan di daerah-daerah, RI memperbolehkan daerah mencetak Oeang Repoeblik Indonesia Daerah, yang disingkat ORIDA.<sup>23</sup>

Peranan pemerintah dalam mesejahterakan kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukannya, adapun salah satu bentuknya yaitu dengan cara menjalankan roda perekonomian yang menggunakan uang sebagai alatnya, karena perekonomian suatu bangsa atau daerah merupakan suatu alat atau barometer utuk mengukur tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Dengan melihat situasi perekonomian daerah-daerah di Indonesia pda tahun 1947 terutama daerah Banten yang telah terputus jalur hubungannya dengan pusat maka perkembangan perekonomian telah mengalami kemunduran yakni berhentinya suplai alat oekonomian (uang) dari pusat ke daerah, maka dari itu peran pemeintah sangatlah

---

<sup>23</sup>Abdullah, *Peranan Mata Uang ORIDAB Dalam Perekonomian Daerah Banten Tahun 1947-1949*,....., p.35

dibutuhkan dalam menentukan dan mengambil suatu kebijakan. hal ini telah dilakukan oleh Residen Banten pada saat itu yakni KH Ahmad Chatib dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara membuat uang sendiri yang disebut ORIDAB ( Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten ).<sup>24</sup>

Secara historis Karesidenan Banten telah membangun hubungan Internasonal dengan melalui jalur darat, sehingga terjadilah hubungan perdagangan. Pada masa perjuangan tahun 1945/1946 Pemerintah Pusat RI di Yogyakarta putus hubungan dengan Pemerintah Daerah Keresidenan Banten. Untuk memenuhi kebutuhan dan alat pembayaran di daerah maka Pemerintah Pusat di Yogyakarta memerintahkan Residen Banten K.H. TB. Achmad Chatib untuk mencetak dan mengeluarkan Uang Kertas Darurat Banten (ORIDAB) khusus untuk wilayah Banten yang termasuk Tangerang, Jasinga dan Lampung Selatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdullah, *Peranan Mata Uang ORIDAB Dalam Perekonomian Daerah Banten Tahun 1947-1949*, SKRIPSI, (Serang : 2001), p. 65

<sup>25</sup> Majalah Keuangan Sektor Publik Anggaran, Nagara Dana Raksa, Album Peringatan 47 tahun ORI (1946-1993), p. 16.